

Determinan Pelaporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Pamboang Kabupaten Majene

La Ode Hidayat^{1✉}, Nur Hidayah¹, Rian Puspitasari¹

¹ Program Studi Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat
**e-mail: laode.hidayat@unsulbar.ac.id*

Diterima Redaksi: 20-05-2025; Selesai Revisi: 4-06-2025; Diterbitkan Online: 28-07-2025-7

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional terhadap pelaporan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Pamboang Kabupaten Majene. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif-kausal. Populasi penelitian berjumlah 158 pegawai yang terlibat dalam pengelolaan BLUD, dengan sampel 61 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD ($p=0,005$), kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif signifikan ($p=0,006$), dan pengawasan fungsional berpengaruh negatif signifikan ($p=0,019$). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan ($p=0,000$) dengan Adjusted R Square 0,319. Kesimpulannya, peningkatan pelaporan kinerja BLUD memerlukan integrasi sistem, penguatan kompetensi teknis, pembagian tugas yang jelas, dan pengawasan konstruktif.

Kata kunci: BLUD; kompetensi sumber daya manusia; pelaporan kinerja; pengawasan fungsional; teknologi informasi.

Pendahuluan

Reformasi tata kelola sektor publik menuntut organisasi pemerintah tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu membuktikan kinerja, akuntabilitas, transparansi, dan mutu layanan secara terukur. Dalam perspektif New Public Management (NPM), desentralisasi memberi ruang fleksibilitas manajerial, namun harus diimbangi sistem pertanggungjawaban yang kuat karena kualitas pelaporan berperan menghubungkan penggunaan sumber daya dengan kinerja organisasi publik melalui mekanisme akuntabilitas. Konteks ini relevan bagi Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). (Tran et al., 2021).

BLUD dirancang untuk memberi fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit pelayanan publik agar layanan lebih responsif, efektif, dan produktif tanpa melepaskan akuntabilitas. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menegaskan bahwa BLUD diselenggarakan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat, sedangkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tetap menempatkan BLUD dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, hingga pengawasan.

Dengan demikian, fleksibilitas BLUD hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila didukung pelaporan kinerja yang akurat, tepat waktu, dan dapat diverifikasi. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018; Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Pada sektor kesehatan, BLUD Puskesmas memiliki posisi strategis karena Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022) menempatkan BLUD Puskesmas sebagai bagian dari penguatan tata kelola pelayanan kesehatan primer. Namun, perubahan status kelembagaan tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang lebih baik karena pelaporan kinerja tetap bergantung pada kesiapan administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, dan mekanisme pengawasan yang memastikan data layanan dan keuangan tersaji secara konsisten. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; Fan, 2025).

Berbagai studi menunjukkan bahwa pelaporan dan pengelolaan keuangan BLUD dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan fungsional, sistem akuntansi, dan pengendalian internal. Namun, hasil penelitian sebelumnya belum sepenuhnya konsisten; sebagian menemukan teknologi dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan, sedangkan studi lain menunjukkan pengaruh teknologi tidak selalu signifikan. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hubungan antarvariabel sangat dipengaruhi konteks organisasi, integrasi sistem, kesiapan pegawai, dan kualitas pendampingan. (Aini & Yasni, 2022; Sandria et al., 2020; Wismoyo & Nasution, 2022; Ricardo et al., 2023).

Konteks empiris Kabupaten Majene menunjukkan persoalan substantif pada pelaporan BLUD Puskesmas. Hasil penelusuran BPK terhadap buku besar kas BLUD pada SIPD menemukan ketidaksesuaian antara saldo buku besar dan neraca konsolidasi: jumlah kas dalam buku besar seluruh Puskesmas sebesar Rp13.700.274.299, sedangkan yang tercatat dalam neraca konsolidasi hanya Rp1.370.641.472, sehingga terdapat selisih Rp12.329.632.827. Pada Puskesmas Pamboang, kas dalam buku besar tercatat Rp1.491.955.826, tetapi belum dicantumkan secara spesifik dalam neraca konsolidasi karena laporan audit keuangan belum disampaikan. Selain itu, laporan pendapatan dan pengeluaran masih melalui pencatatan manual, Buku Kas Umum, dan input SIPD, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, duplikasi, dan inkonsistensi data. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional terhadap pelaporan kinerja BLUD Puskesmas Pamboang Kabupaten Majene, dengan kebaruan pada fokus pelaporan kinerja BLUD Puskesmas sebagai instrumen akuntabilitas, bukan sekadar efektivitas pengelolaan keuangan atau kualitas laporan keuangan secara umum.

Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif-kausal dan kerangka pelaporan observasional potong lintang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional terhadap pelaporan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Pamboang Kabupaten Majene. Desain kuantitatif memungkinkan hubungan antarvariabel diuji secara objektif melalui pengukuran numerik, sedangkan pelaporan rancangan potong lintang perlu disajikan secara transparan agar proses pemilihan responden, pengukuran variabel, dan analisis data dapat dinilai secara kritis oleh pembaca ilmiah. (Creswell & Creswell, 2018; von Elm et al., 2007).

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pada Mei 2025. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Puskesmas Pamboang yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan BLUD sebanyak 158 orang. Sampel penelitian berjumlah 61 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive

sampling. Teknik purposive sampling digunakan karena tidak semua anggota populasi memiliki pengalaman dan akses yang relevan terhadap proses pelaporan kinerja BLUD. (Creswell & Creswell, 2018; Sekaran & Bougie, 2016).

Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur berskala Likert empat pilihan, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Instrumen penelitian mengukur empat konstruk, yaitu pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja BLUD. Pengembangan butir kuesioner mengacu pada indikator yang digunakan dalam penelitian BLUD sebelumnya, kemudian disesuaikan dengan konteks Puskesmas Pamboang agar tetap relevan secara konseptual dan operasional. Penggunaan instrumen terstruktur penting untuk menjaga konsistensi pengukuran, meminimalkan variasi interpretasi responden, dan memperkuat validitas konstruk dalam penelitian organisasi publik. (Aini & Yasni, 2022; DeVellis, 2017).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pelaporan kinerja BLUD, yang mencakup dimensi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Variabel independen terdiri atas pemanfaatan teknologi informasi yang mencerminkan intensitas, frekuensi, dan keragaman aplikasi yang digunakan; kompetensi sumber daya manusia yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan pengalaman; serta pengawasan fungsional yang mencakup pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian. Definisi operasional tersebut disusun agar setiap konstruk memiliki indikator yang dapat diukur dan selaras dengan regulasi BLUD serta penelitian terdahulu mengenai pengelolaan keuangan dan kualitas pelaporan Puskesmas BLUD. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018; Ricardo et al., 2023; Wismoyo & Nasution, 2022).

Analisis data dilakukan secara bertahap. Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi setiap variabel. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model regresi. Selanjutnya, analisis multivariat dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menilai pengaruh parsial dan simultan variabel independen terhadap pelaporan kinerja BLUD, dengan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t pada tingkat signifikansi 0,05. Pendekatan regresi linear berganda sesuai digunakan ketika penelitian menguji kontribusi beberapa prediktor terhadap satu variabel dependen dalam model kuantitatif. (Hair et al., 2019).

Penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian melalui pemberian informasi kepada responden mengenai tujuan penelitian, kesukarelaan partisipasi, kerahasiaan data, dan penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik. Identitas responden tidak ditampilkan dalam pelaporan hasil, sehingga data dianalisis dalam bentuk agregat. Penerapan prinsip *informed consent*, *confidentiality*, *beneficence*, *justice*, dan *non-maleficence* diperlukan untuk menjaga integritas penelitian serta melindungi responden dalam studi berbasis organisasi layanan kesehatan. (World Medical Association, 2013)

Hasil

1. Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	Kategori	n	%
Jenis kelamin	Laki-laki	9	14,8
	Perempuan	52	85,2
Umur	20-30 tahun	24	39,3
	31-40 tahun	25	41,0
	41-50 tahun	12	19,7
Pendidikan terakhir	SMA/SMK	1	1,6

	D3	23	37,7
	S1	37	60,7
Lama bekerja	1-5 tahun	35	57,4
	6-10 tahun	13	21,3
	>10 tahun	13	21,3

Sumber: Data primer, 2025.

Karakteristik responden menunjukkan dominasi perempuan sebanyak 52 orang (85,2%), umur 31-40 tahun sebanyak 25 orang (41,0%), pendidikan S1 sebanyak 37 orang (60,7%), dan masa kerja 1-5 tahun sebanyak 35 orang (57,4%). Komposisi ini menunjukkan bahwa responden berada pada usia produktif dan memiliki modal pendidikan formal yang cukup, tetapi kemampuan pelaporan BLUD tetap perlu dibaca dari kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan teknis administrasi, akuntansi pemerintahan, dan penggunaan sistem informasi keuangan, bukan hanya dari jenjang pendidikan formal. (Aini & Yasni, 2022; Ricardo et al., 2023; Kartika & Ningsih, 2024).

2. Distribusi Variabel Penelitian

Tabel 2. Distribusi Variabel Independen terhadap Pelaporan Kinerja BLUD

Variabel	Kategori	Pelaporan Tinggi n (%)	Pelaporan Rendah n (%)	Total n (%)
Pemanfaatan teknologi informasi	Tinggi	21 (44,7)	12 (85,7)	33 (54,1)
	Rendah	26 (55,3)	2 (14,3)	28 (45,9)
Kompetensi sumber daya manusia	Tinggi	12 (25,5)	11 (78,6)	23 (37,7)
	Rendah	35 (74,5)	3 (21,4)	38 (62,3)
Pengawasan fungsional	Tinggi	29 (61,7)	13 (92,9)	42 (68,9)
	Rendah	18 (38,3)	1 (7,1)	19 (31,1)

Sumber: Data primer, 2025.

Distribusi variabel menunjukkan bahwa 47 responden (77,0%) menilai pelaporan kinerja BLUD berada pada kategori tinggi, sedangkan 14 responden (23,0%) menilai rendah. Namun, kategori tinggi pada pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi SDM, dan pengawasan fungsional tidak selalu diikuti pelaporan yang lebih tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa pelaporan BLUD merupakan proses organisasi yang kompleks; teknologi dapat mempercepat pelaporan apabila sistem terintegrasi dan pengguna siap, tetapi dapat menambah beban apabila terjadi input berulang, keterbatasan jaringan, atau aplikasi belum sesuai alur kerja. (Hair et al., 2019; Sekaran & Bougie, 2016; Surya, 2024).

3. Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Ringkasan Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Indikator	Nilai	Interpretasi
Normalitas	Asymp. Sig. Kolmogorov-Smirnov	0,200	Residual berdistribusi normal
Multikolinearitas	Tolerance X1; X2; X3	0,864; 0,866; 0,944	Tidak terjadi multikolinearitas
	VIF X1; X2; X3	1,157; 1,155; 1,059	Seluruh VIF < 10
Heteroskedastisitas	Sig. Glejser X1; X2; X3	0,129; 0,510; 0,718	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer, 2025.

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan model regresi memenuhi syarat analisis: residual berdistribusi normal dengan Asymp. Sig. 0,200, tidak terjadi multikolinearitas karena tolerance seluruh variabel >0,10 dan VIF <10, serta tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansi Glejser seluruh variabel >0,05. Dengan demikian, model layak digunakan untuk menjelaskan

pengaruh sistem, manusia, dan pengawasan terhadap pelaporan kinerja BLUD secara statistik maupun substantif. (Hair et al., 2019; Fan, 2025; Tran et al., 2021).

4. Pengaruh Simultan Variabel Independen terhadap Pelaporan Kinerja BLUD

Tabel 4. Koefisien Determinasi dan Uji Simultan

Pengujian	Nilai	Interpretasi
R	0,594	Hubungan model berada pada kategori sedang
R Square	0,353	Model menjelaskan 35,3% variasi pelaporan kinerja
Adjusted R Square	0,319	Kontribusi efektif variabel independen sebesar 31,9%
F hitung	10,355	Model berpengaruh simultan
Sig. F	0,000	Signifikan pada alpha 0,05

Sumber: Data primer, 2025.

Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,319, yang berarti pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional secara bersama-sama menjelaskan 31,9% variasi pelaporan kinerja BLUD, sementara 68,1% dipengaruhi faktor lain seperti kepemimpinan, budaya organisasi, integrasi sistem, pengendalian internal, komitmen organisasi, dan dukungan kebijakan. Uji F menunjukkan nilai 10,355 dengan signifikansi 0,000, sehingga ketiga variabel berpengaruh simultan terhadap pelaporan kinerja BLUD. Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas pelaporan merupakan hasil interaksi antara sistem informasi, kapasitas manusia, dan mekanisme kontrol organisasi. (Aini & Yasni, 2022; Sandria et al., 2020; Tran et al., 2021; Tran et al., 2024).

5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pelaporan Kinerja BLUD

Tabel 5. Hasil Uji Parsial Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel	t hitung	Sig.	Arah Pengaruh	Keputusan
Pemanfaatan teknologi informasi	-2,892	0,005	Negatif	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data primer, 2025.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD dengan t hitung -2,892 dan signifikansi 0,005. Arah negatif menunjukkan bahwa penggunaan teknologi belum otomatis memperbaiki pelaporan apabila sistem belum terintegrasi, input data masih berulang, pengguna belum siap secara teknis, dan alur manual masih berjalan berdampingan dengan aplikasi digital. Temuan ini sejalan dengan pendekatan socio-technical system dan Human-Organization-Technology Fit yang menekankan bahwa manfaat teknologi bergantung pada kesesuaian teknologi, pengguna, dan organisasi; karena itu, teknologi informasi perlu diikuti penyederhanaan alur, integrasi sistem, dan peningkatan kapasitas operator. (Aini & Yasni, 2022; Surya, 2024; Tran et al., 2022; Afdila et al., 2024; Wismoyo & Nasution, 2022).

6. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pelaporan Kinerja BLUD

Tabel 6. Hasil Uji Parsial Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel	t hitung	Sig.	Arah Pengaruh	Keputusan
Kompetensi sumber daya manusia	-2,840	0,006	Negatif	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data primer, 2025.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD dengan t hitung -2,840 dan signifikansi 0,006. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan

kebutuhan teknis pelaporan BLUD, terutama jika pendidikan, pelatihan, dan pengalaman lebih berorientasi pada pelayanan klinis daripada administrasi keuangan, akuntansi pemerintahan, rekonsiliasi data, dan penggunaan aplikasi. Dalam perspektif Goal Setting Theory, kompetensi baru berdampak optimal apabila diarahkan pada target pelaporan yang jelas, pembagian tugas yang tegas, pelatihan relevan, dan umpan balik berkelanjutan. (Kartika & Ningsih, 2024; Ricardo et al., 2023; Locke & Latham, 2002; Tran & Hoang, 2024; Wismoyo & Nasution, 2022).

7. Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Pelaporan Kinerja BLUD

Tabel 7. Hasil Uji Parsial Variabel Pengawasan Fungsional

Variabel	t hitung	Sig.	Arah Pengaruh	Keputusan
Pengawasan fungsional	-2,413	0,019	Negatif	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data primer, 2025.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD dengan t hitung -2,413 dan signifikansi 0,019. Secara teoritis, pengawasan diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas, tetapi arah negatif menunjukkan bahwa pengawasan yang dominan korektif setelah laporan selesai dapat menambah revisi, memperlambat penyelesaian laporan, dan belum berfungsi sebagai pembinaan. Dalam perspektif NPM dan Goal Setting Theory, pengawasan seharusnya menjadi mekanisme umpan balik yang periodik, dialogis, dan preventif agar fleksibilitas BLUD menghasilkan laporan yang valid, tepat waktu, serta berguna bagi perbaikan kinerja. (Fan, 2025; Sandria et al., 2020; Hood, 1991; Locke & Latham, 2002; Tran et al., 2024).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional secara bersama-sama berpengaruh terhadap pelaporan kinerja BLUD Puskesmas Pamboang. Dalam perspektif tata kelola sektor publik, hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa pelaporan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen akuntabilitas yang menghubungkan penggunaan sumber daya publik dengan kinerja organisasi. Tran et al. (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan berperan dalam memperkuat kinerja organisasi publik melalui mekanisme akuntabilitas, sedangkan Fan (2025) menegaskan bahwa akuntabilitas organisasi publik semakin dipahami sebagai proses yang menuntut kemampuan organisasi untuk menjelaskan, membuktikan, dan memperbaiki kinerjanya kepada pemangku kepentingan.

Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pelaporan kinerja BLUD, tetapi arah pengaruhnya menunjukkan bahwa teknologi belum sepenuhnya menjadi penguat pelaporan. Temuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan sistem digital dalam pelaporan BLUD Puskesmas Pamboang belum otomatis menghasilkan pelaporan yang lebih baik apabila masih terdapat pencatatan manual, input data berulang, keterbatasan integrasi aplikasi, dan kemampuan operator yang belum merata. Kondisi ini sejalan dengan Surya (2024) yang menunjukkan bahwa kurangnya integrasi sistem menjadi masalah penting dalam implementasi E-BLUD, serta sejalan dengan Rivero del Paso et al. (2023) yang menekankan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan publik harus didukung oleh kesesuaian fungsi, arsitektur sistem, tata kelola, dan proses bisnis agar tidak hanya memindahkan beban manual ke sistem elektronik. Pedoman IMF tersebut memang dirancang sebagai rujukan komprehensif untuk menilai, merancang, dan memperbaiki inisiatif digital pada pengelolaan keuangan publik.

Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan Wismoyo dan Nasution (2022) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak selalu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas BLUD. Kesamaan ini memperkuat argumentasi bahwa teknologi informasi dalam organisasi publik tidak dapat dipahami hanya sebagai keberadaan aplikasi, tetapi harus dilihat dari kesiapan pengguna, stabilitas infrastruktur, kejelasan prosedur, dan integrasi data. Namun, temuan ini berbeda dengan Afdila et al. (2024) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat mendukung pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh konteks organisasi; pada lingkungan yang sistemnya matang dan pengguna lebih siap, teknologi berfungsi sebagai sarana efisiensi, sedangkan pada organisasi yang masih mengalami transisi digital, teknologi dapat menambah beban administratif. Literatur transformasi digital sektor publik juga menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi, tetapi pada desain strategi, kepercayaan, transparansi, dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan pengguna (Desouza & Dawson, 2024). Artikel tersebut menekankan bahwa transformasi digital sektor publik perlu diarahkan pada penciptaan nilai publik dan penyediaan informasi serta layanan yang lebih bermakna bagi warga.

Keunikan temuan penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa penggunaan teknologi informasi justru dapat berkorelasi dengan hambatan pelaporan ketika digitalisasi tidak diikuti penyederhanaan proses. Dalam pendekatan *socio-technical system* dan *Human-Organization-Technology Fit*, sistem informasi hanya akan efektif apabila terdapat kesesuaian antara teknologi, manusia, organisasi, dan proses kerja. Pada Puskesmas Pamboang, teknologi belum sepenuhnya menggantikan proses manual, tetapi berjalan berdampingan dengan mekanisme pencatatan lama. Akibatnya, pegawai dapat mengalami beban ganda, yaitu menyusun dokumen manual sekaligus menginput data ke sistem. Implikasi praktisnya, penguatan teknologi informasi tidak cukup dilakukan dengan menyediakan aplikasi, tetapi perlu disertai integrasi data, penyederhanaan alur, pelatihan operator, dukungan teknis, serta evaluasi berkala terhadap hambatan penggunaan sistem (Rivero del Paso et al., 2023; Surya, 2024).

Pada variabel kompetensi sumber daya manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pelaporan kinerja BLUD, tetapi arah pengaruhnya mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan kebutuhan teknis pelaporan. Temuan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik Puskesmas sebagai organisasi pelayanan kesehatan primer, di mana sebagian besar pegawai memiliki kompetensi yang lebih dekat dengan pelayanan klinis dan kesehatan masyarakat, sementara pelaporan BLUD membutuhkan kemampuan administrasi keuangan, akuntansi pemerintahan, rekonsiliasi data, pengelolaan dokumen, dan penggunaan sistem informasi. Dengan demikian, kompetensi formal tidak selalu identik dengan kompetensi pelaporan apabila bidang kompetensi tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Temuan ini sejalan dengan Ricardo et al. (2023), Wismoyo dan Nasution (2022), serta Kartika dan Ningsih (2024) yang menempatkan kompetensi sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam kualitas laporan keuangan dan pelaporan organisasi sektor publik. Kesamaannya terletak pada pandangan bahwa kualitas laporan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pegawai dalam memahami standar, prosedur, dan sistem pelaporan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan penting karena menunjukkan bahwa kompetensi dapat menghasilkan arah pengaruh yang tidak mendukung apabila kompetensi tersebut belum spesifik pada tugas pelaporan BLUD. Kartika dan Ningsih (2024) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia perlu dilihat

bersama sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi pemerintah agar dapat menghasilkan laporan yang berkualitas.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kompetensi tidak cukup diukur dari pendidikan, pengalaman, atau pelatihan secara umum. Kompetensi yang relevan bagi pelaporan BLUD harus bersifat teknis dan kontekstual, seperti kemampuan memahami regulasi BLUD, menyusun dokumen pertanggungjawaban, melakukan rekonsiliasi kas, mengelola data berbasis sistem, dan memastikan kesesuaian antara laporan keuangan dan laporan kinerja. Dalam perspektif *Goal Setting Theory*, kompetensi baru dapat meningkatkan kinerja apabila diarahkan pada tujuan yang jelas, target yang spesifik, pembagian peran yang tegas, dan umpan balik yang berkelanjutan. Dengan demikian, pegawai yang memiliki pendidikan tinggi tetap memerlukan pelatihan teknis dan pendampingan agar kompetensinya terhubung langsung dengan kebutuhan pelaporan BLUD (Locke & Latham, 2002; Tran & Hoang, 2024).

Implikasi ilmiah dari temuan ini adalah perlunya membedakan antara kompetensi umum dan kompetensi fungsional dalam studi pelaporan sektor publik. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak selalu berdampak positif apabila tidak selaras dengan kebutuhan tugas. Implikasi praktisnya, Puskesmas BLUD perlu menyusun peta kompetensi pelaporan, menetapkan pegawai yang memiliki kemampuan administrasi dan keuangan, menyediakan pelatihan berbasis kasus pelaporan BLUD, serta membangun mekanisme pendampingan dari Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, atau auditor internal. Dengan langkah tersebut, kompetensi pegawai tidak berhenti sebagai kapasitas personal, tetapi menjadi kemampuan organisasi dalam menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel (Kartika & Ningsih, 2024; Ricardo et al., 2023).

Pada variabel pengawasan fungsional, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap pelaporan kinerja BLUD, tetapi arah pengaruhnya menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pembinaan. Secara teoritis, pengawasan diperlukan untuk menjamin kepatuhan, validitas data, dan akuntabilitas laporan. Namun, dalam konteks penelitian ini, pengawasan yang cenderung dilakukan setelah laporan selesai dapat menambah beban revisi dan memperlambat proses pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang bersifat korektif-administratif belum cukup untuk memperkuat kualitas pelaporan apabila tidak disertai pendampingan, koreksi dini, dan umpan balik yang operasional.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan Sandria et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pengawasan fungsional merupakan determinan penting dalam efektivitas pengelolaan keuangan BLUD. Kesamaannya terletak pada posisi strategis pengawasan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, penelitian ini memberikan penekanan yang berbeda, yaitu bahwa pengawasan dapat menjadi kontraproduktif apabila hanya berorientasi pada pemeriksaan kesalahan, bukan pada perbaikan proses. Literatur akuntabilitas sektor publik juga menunjukkan bahwa pengawasan menghadapi tantangan dalam kapasitas, relasi akuntabilitas, dan pendekatan yang digunakan untuk memastikan kinerja sektor publik berjalan efektif (Fan, 2025).

Keunikan temuan ini terletak pada perlunya reposisi pengawasan fungsional. Dalam perspektif *New Public Management*, pengawasan seharusnya memastikan bahwa fleksibilitas BLUD tetap berada dalam koridor akuntabilitas dan peningkatan kinerja. Dalam perspektif *Goal Setting Theory*, pengawasan berfungsi sebagai umpan balik terhadap kesenjangan antara target dan realisasi pelaporan. Apabila umpan balik diberikan terlambat, tidak spesifik, atau hanya menekankan kesalahan administratif, maka pengawasan tidak menghasilkan pembelajaran organisasi. Sebaliknya, pengawasan yang dialogis, preventif, dan berkelanjutan dapat menjadi

instrumen perbaikan yang membantu pegawai menyusun laporan secara lebih tepat sejak awal. Leixnering et al. (2024) menegaskan bahwa audit publik dalam tata kelola terdelegasi tidak hanya memperkuat akuntabilitas administratif, tetapi juga dapat memperbaiki manajemen relasi dan koordinasi antara unit administrasi dan penyedia layanan.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya mengubah pendekatan pengawasan dari sekadar pemeriksaan menjadi pembinaan. Puskesmas BLUD membutuhkan pengawasan yang hadir lebih awal dalam siklus pelaporan, bukan hanya setelah laporan selesai. Pengawasan sebaiknya dilakukan melalui pendampingan penyusunan laporan, verifikasi berkala, pemberian umpan balik teknis, dan penyusunan standar operasional yang mudah diikuti. Dengan demikian, pengawasan fungsional dapat menjadi mekanisme pencegahan kesalahan, bukan hanya alat koreksi. Pendekatan ini sejalan dengan arah baru pelaporan pemerintah yang menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan, pelaporan berbasis data, dan informasi yang lebih proaktif untuk mendukung akuntabilitas publik (Fan, 2025; Leixnering et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional belum cukup apabila implementasinya belum terintegrasi dengan kebutuhan pelaporan BLUD. Teknologi informasi perlu dipadukan dengan proses bisnis yang sederhana dan sistem yang saling terhubung. Kompetensi pegawai perlu diarahkan pada kebutuhan teknis pelaporan, bukan hanya kompetensi umum atau klinis. Pengawasan fungsional perlu dikembangkan sebagai mekanisme pembinaan dan pembelajaran organisasi. Temuan ini memperkuat literatur kinerja sektor publik yang menekankan bahwa akuntabilitas, kualitas pelaporan, sistem pengukuran kinerja, dan otonomi keuangan saling berkaitan dalam membentuk kinerja organisasi publik (Tran et al., 2021; Tran et al., 2024).

Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah memperluas pemahaman tentang pelaporan kinerja BLUD Puskesmas sebagai proses sosial-teknis, bukan sekadar proses administratif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang secara teoritis dianggap mendukung pelaporan dapat menghasilkan efek yang berbeda ketika organisasi belum memiliki integrasi sistem, kompetensi teknis yang sesuai, dan pengawasan yang membina. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akuntabilitas sektor publik, khususnya pada organisasi pelayanan kesehatan primer yang memiliki fleksibilitas keuangan tetapi masih menghadapi keterbatasan kapasitas administratif. Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa reformasi pelaporan sektor publik harus memperhatikan desain sistem, kapasitas manusia, dan mekanisme kontrol secara bersamaan (Fan, 2025; Rivero del Paso et al., 2023).

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan tata kelola pelaporan BLUD Puskesmas Pamboang melalui tiga agenda utama. Pertama, sistem pelaporan perlu disederhanakan dan diintegrasikan agar tidak terjadi pengulangan input data dan inkonsistensi laporan. Kedua, pengembangan kompetensi harus diarahkan pada kebutuhan spesifik pelaporan BLUD, termasuk administrasi keuangan, standar akuntansi pemerintahan, rekonsiliasi data, dan penggunaan aplikasi. Ketiga, pengawasan fungsional perlu dilakukan secara konstruktif melalui pendampingan rutin, koreksi dini, dan umpan balik yang dapat langsung digunakan untuk memperbaiki laporan. Agenda tersebut penting agar pelaporan kinerja BLUD tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan pelayanan kesehatan primer yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan layanan (Fan, 2025; Tran et al., 2021; Tran et al., 2024).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu Puskesmas BLUD, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh Puskesmas BLUD di Kabupaten Majene maupun daerah lain. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner, sehingga belum menggali secara mendalam pengalaman pegawai, hambatan teknis sistem, dan dinamika pengawasan melalui wawancara atau observasi. Ketiga, variabel penelitian hanya mencakup pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional, sementara pelaporan kinerja BLUD juga dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen pegawai, sistem pengendalian internal, dukungan pemerintah daerah, serta integrasi aplikasi. Keempat, data yang digunakan merupakan persepsi responden, sehingga masih berpotensi dipengaruhi subjektivitas penilaian. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi, menggunakan pendekatan campuran, dan menambahkan variabel organisasi lain agar pemahaman mengenai pelaporan kinerja BLUD menjadi lebih komprehensif.

Simpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD dengan nilai signifikansi 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi belum sepenuhnya mendukung pelaporan karena masih terdapat kendala integrasi sistem, teknis aplikasi, dan pemerataan kemampuan pengguna.
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD dengan nilai signifikansi 0,006. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan teknis pelaporan, terutama pada aspek administrasi keuangan, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja.
3. Pengawasan fungsional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD dengan nilai signifikansi 0,019. Pengawasan yang berjalan masih perlu diarahkan dari pola administratif-korektif menuju pembinaan, pendampingan, dan perbaikan berkelanjutan.
4. Secara simultan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD dengan nilai signifikansi 0,000 dan kontribusi efektif 31,9%, sedangkan 68,1% dipengaruhi faktor lain di luar model.
5. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja BLUD Puskesmas Pamboang membutuhkan integrasi sistem pelaporan, pelatihan teknis sesuai kebutuhan, pembagian tugas yang jelas, serta pengawasan yang membina agar laporan lebih akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Referensi

- Afdila, D., Nanda, S. T., & Putri, N. E. (2024). The influence of human resource competency, utilization of information technology, and organizational commitment to financial management of the regional government of Kota Pariaman. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 1–15.
- Aini, Z., & Yasni, H. (2022). Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 3(2), 176–190.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Desouza, K. C., & Dawson, G. S. (2024). Digital transformation of the public sector: Designing strategic information systems. *The Journal of Strategic Information Systems*, 33(2), 101832. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2024.101832>
- DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fan, Y. (2025). Accountability in public organization: A systematic literature review and future research agenda. *Public Organization Review*, 25, 295–310. <https://doi.org/10.1007/s11115-024-00792-y>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard: Measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71–79.
- Kartika, V. N., & Ningsih, S. (2024). The influence of internal control systems, implementation of government accounting standards, and human resource competence on financial report quality. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 21(2), 24–38. <https://doi.org/10.14710/jaa.21.2.24-38>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Buku saku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Leixnering, S., Höllerer, M. A., Polzer, T., & Schiffinger, M. (2024). The role of public auditing in delegated governance. *Journal of Accounting and Public Policy*, 43(6), 107281. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2024.107281>
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. *American Psychologist*, 57(9), 705–717. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.9.705>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia.
- Ricardo, R., Trisna, W. V., & Astika, F. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan (BLUD) Puskesmas pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(1), 117–125.
- Rivero del Paso, L., Pattanayak, S., Uña, G., & Tourpe, H. (2023). Digital solutions guidelines for public financial management. *IMF Technical Notes and Manuals*, 2023(007). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9798400251566.005>

- Sandria, M., Agusti, R., & Putra, A. A. (2020). Determinan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Dimoderasi sistem pengendalian intern pemerintah. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 1(2), 264–284.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Wiley.
- Surya, R. A. (2024). The lack of integration in E-BLUD implementation: A critical HOT-Fit Framework approach. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 12(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v12i4.97581>
- Tran, Y. T., & Hoang, T. C. (2024). Transformational leadership and public employee performance: The mediating roles of employee participation and public service motivation. *International Review of Administrative Sciences*, 90(4), 763–780. <https://doi.org/10.1177/00208523241230439>
- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The role of accountability in determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(1), 106801. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801>
- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2022). How do innovation and financial reporting influence public sector performance in a transition market? *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 12(4), 645–662. <https://doi.org/10.1108/JAEE-06-2021-0180>
- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., Nhu, L. T. B., & Hao, N. T. T. (2024). Enhancing public organizational performance in Vietnam: The role of top management support, performance measurement systems, and financial autonomy. *Public Performance & Management Review*. <https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2358839>
- von Elm, E., Altman, D. G., Egger, M., Pocock, S. J., Gøtzsche, P. C., & Vandenbroucke, J. P. (2007). The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: Guidelines for reporting observational studies. *PLoS Medicine*, 4(10), e296. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040296>
- Wismoyo, U., & Nasution, J. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 11(1), 29–39.
- World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. *JAMA*, 310(20), 2191–2194. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053>